

Bupati Buton Selatan H Muh Adios Dorong Transformasi Pendidikan pada Hardiknas 2026



Hardiknas 2026, Bupati Buton Selatan H Muh Adios Tekankan SDM Unggul dan Berdaya Saing

Laporan: Ardi, Baubau Post-Durasi Times

BUTON SELATAN, BP-Pemerintah Kabupaten Buton Selatan menegaskan komitmennya dalam membangun sumber daya manusia (SDM) unggul melalui momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 yang dipusatkan di halaman SMP Negeri 1 Batauga, Sabtu (2/5/2026).

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, pemerintah daerah Kabupaten Buton selatan memberikan penghargaan kepada 10 guru berprestasi yang dinilai memiliki dedikasi

Lanjut ke Hal: 7

445 WBP dan Pegawai Lapas Baubau Ikuti Skrining Kesehatan Massal Untuk Cegah Penyakit Menular



Laporan: Firman

BAUBAU, BP-Sebanyak 445 warga binaan pemasyarakatan (WBP) bersama pegawai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kota Baubau menjalani skrining kesehatan massal yang dilaksanakan selama dua hari, pada 29-30 April 2026.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Cek Kesehatan Gratis yang dirangkaikan dengan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL), sebagai bentuk pemenuhan hak dasar kesehatan bagi seluruh warga negara tan-

pa terkecuali.

Pelaksanaan skrining ini digagas melalui kolaborasi antara Dinas Kesehatan Kota Baubau dengan tujuh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) puskesmas yang tersebar di wilayah setempat.

Adapun puskesmas yang terlibat meliputi Puskesmas Bataraguru, Puskesmas Wolio, Puskesmas Bukit Wolio Indah, Puskesmas Wajo, serta Puskesmas Kodolomoko, Katobengeke, dan Waborobo.

Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Baubau, dr. Frederik

Tangke Allo, Sp.B, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, termasuk warga binaan di lingkungan pemasyarakatan.

Ia menjelaskan bahwa layanan yang diberikan tidak hanya sebatas pemeriksaan kesehatan umum, tetapi juga mencakup deteksi dini dan upaya pencegahan berbagai penyakit.

Rangkaian pemeriksaan meliputi skrining

Lanjut ke Hal: 7

Momentum Hardiknas, Disdik Buton Selatan Fokus Pembelajaran dan Revitalisasi



Kepala Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Buton Selatan, La Amiru Bersama Kepala kesbangPol Busel La Makiki



Kadis Pendidikan Busel La Bariu, SPd

Laporan: Firman

BUTON SELATAN, BP-Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Selatan menegaskan komitmennya dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui penguatan pembelajaran, transparansi sistem penerimaan siswa baru, serta percepatan digitalisasi sekolah pada momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardi-

knas) 2026.

Komitmen tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam menjawab tantangan pendidikan di era modern, sekaligus memastikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat.

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Buton Selatan, La Amiru, mengatakan bahwa peningka-

tan kualitas pembelajaran menjadi fokus utama, terutama melalui pendekatan pembelajaran mendalam.

"Prioritas kami adalah memastikan kualitas pembelajaran terus meningkat, termasuk melalui penguatan metode pembelajaran yang lebih mendalam dan efektif," ujarnya.

Selain pembelajaran,

Lanjut ke Hal: 7

Sinergi Daerah dan KKP, HMNI Sultra Targetkan Seluruh Wilayah Terlibat Program KNMP Termasuk Nelayan Buton Selatan

Laporan: Ardi

BUSEL, BP-Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Provinsi Sulawesi Tenggara memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui pengembangan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang kini mulai menunjukkan progres di sejumlah wilayah.

Program tersebut menjadi bagian dari strategi pemberdayaan masyarakat pesisir yang dijalankan secara kolaboratif bersama pemerintah daerah dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), terutama dalam menjawab tantangan ekonomi nelayan yang selama ini bergantung pada hasil tangkap yang fluktuatif.

Sekretaris HMNI Sulawesi Tenggara Laisi mengatakan bahwa pihaknya terus mendorong per-



Sekretaris HMNI Sulawesi Tenggara Laisi

cepatan implementasi program di daerah, termasuk memastikan keberlanjutan fasilitas pendukung seperti koperasi nelayan.

"Seperti di Kabupaten Buton Selatan, sudah ada satu lokasi KNMP yang terbangun lengkap dengan koperasi Merah Putih. Ini menjadi model awal penguatan ekonomi nelayan berbasis komunitas," ujar Laisi.

Menurut dia, program KNMP tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pen-

ingkatan kapasitas sumber daya manusia nelayan melalui pendampingan dan penguatan kelembagaan.

Secara kelembagaan, HMNI Sultra juga tengah melakukan konsolidasi organisasi di tingkat kabupaten/kota. Dari total 17 daerah, sebanyak 15 telah memiliki kepengurusan aktif, sementara Kolaka Timur dan Kolaka Utara masih dalam tahap pembentukan.

"Secara umum, tugas kami di provinsi adalah memastikan seluruh daerah memiliki struktur organisasi yang kuat agar program bisa berjalan optimal," katanya.

Ia menambahkan, HMNI yang berdiri secara resmi sejak 2014 memiliki mandat utama dalam pembinaan dan pemberdayaan nelayan, terutama untuk meningkatkan pendapa-

Lanjut ke Hal: 7

Bupati Buton Selatan H Muh Adios Dorong Transformasi Pendidikan pada Hardiknas 2026

si tinggi dalam mendidik generasi muda di wilayah tersebut. Selain itu, dilakukan pula penandatanganan pakta integritas sebagai bentuk komitmen bersama dalam meningkatkan mutu pendidikan daerah.

Upacara peringatan Hardiknas ini dipimpin langsung oleh Bupati Buton Selatan Muhammad Adios, yang hadir bersama Ketua TP PKK Siti Norma Adios serta diikuti Wakil Bupati, unsur Forkopimda, pejabat OPD, kepala sekolah, guru, dan pelajar dari berbagai jenjang pendidikan.

Kegiatan tersebut berlangsung khidmat dengan para peserta mengenakan pakaian adat Buton, mencerminkan perpaduan antara nilai budaya lokal dan semangat nasionalisme dalam dunia pendidikan.

Dalam amanatnya, Bupati Muhammad Adios menegaskan bahwa Hardiknas bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum refleksi untuk memperkuat arah pembangunan pendidikan

nasional. "Pendidikan adalah proses memanusiakan manusia yang dilaksanakan secara tulus, dengan tujuan menumbuhkan potensi dan karakter setiap individu," ujarnya.

Ia menambahkan, pendidikan harus mampu membentuk insan yang beriman, bertakwa, cerdas, mandiri, serta memiliki tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurutnya, konsep pendidikan Indonesia tidak terlepas dari gagasan Ki Hajar Dewantara yang menekankan sistem Among, yakni asah, asih, dan asuh sebagai fondasi pembentukan karakter peserta didik.

"Nilai-nilai pendidikan yang diwariskan Ki Hajar Dewantara tetap relevan dalam menjawab tantangan zaman, termasuk di era globalisasi saat ini," katanya.

Lebih lanjut, ia mengaitkan pembangunan pendidikan dengan visi nasional yang diusung Presiden Prabowo Subianto, yang menempatkan sektor pendidikan sebagai kunci mence-

nah SDM unggul dan berdaya saing global.

"Pendidikan adalah investasi jangka panjang bangsa untuk mewujudkan Indonesia maju, makmur, dan bermartabat," tegasnya.

Secara historis, Hari Pendidikan Nasional diperingati setiap 2 Mei bertepatan dengan hari lahir Ki Hajar Dewantara, tokoh pelopor pendidikan nasional yang mendirikan Taman Siswa pada 1922 sebagai gerakan pendidikan berbasis kebangsaan.

Di tingkat global, perhatian terhadap pendidikan juga ditegaskan melalui agenda UNESCO yang menetapkan pendidikan berkualitas sebagai salah satu tujuan utama dalam Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan keempat (Quality Education).

Bupati Muh Adios juga menyinggung pentingnya inovasi pembelajaran, termasuk pendekatan pembelajaran mendalam yang kini dikembangkan untuk meningkatkan kualitas hasil belajar siswa di ten-

gan perkembangan teknologi.

Upacara Hardiknas 2026 di Buton Selatan diikuti oleh perwakilan siswa SD, SMP, dan SMA serta para tenaga pendidik dari seluruh wilayah kabupaten, sebagai simbol kebersamaan dalam memajukan pendidikan.

Melalui peringatan ini, Pemerintah Kabupaten Buton Selatan berharap seluruh pemangku kepentingan dapat terus bersinergi dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berkualitas.

Peringatan Hardiknas tidak hanya menjadi ajang penghormatan terhadap jasa para pendidik, tetapi juga momentum memperkuat komitmen kolektif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat konstitusi. Pada peringatan Hardiknas itu pula, Bupati Buton Selatan H Muh Adios memberikan sertifikat kepada guru-guru yang menorehkan prestasi di Buton Selatan. (*)

Sinergi Daerah dan KKP, HMNI Sultra Targetkan Seluruh Wilayah Terlibat Program KNMP Termasuk Nelayan Buton Selatan

tan per kapita masyarakat pesisir.

Dalam pelaksanaannya, HMNI menjalin kerja sama dengan KKP melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang mencakup pengawasan dan pendampingan program KNMP di lapangan.

"Peran kami lebih pada penguatan, motivasi, serta memastikan program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh nelayan," jelas Laisi.

Di Kabupaten Buton Selatan, meskipun struktur kepengurusan masih dalam tahap penataan ulang, HMNI tetap melibatkan perwakilan daerah dalam berbagai kegiatan organisasi, baik di tingkat provinsi maupun nasional.

Adapun lima daerah yang menjadi lokasi awal pengembangan KNMP di Sulawesi Tenggara

meliputi Buton Selatan, Kendari, Konawe, Muna, dan Kolaka. Beberapa di antaranya telah menunjukkan perkembangan signifikan dalam pembangunan kawasan nelayan terpadu.

Laisi menegaskan bahwa sinergi antara organisasi masyarakat dan pemerintah menjadi kunci keberhasilan program tersebut. "Kami berharap kolaborasi ini mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan nelayan di Sulawesi Tenggara," ujarnya.

Secara historis, sektor perikanan di Indonesia telah menjadi salah satu tulang punggung ekonomi pesisir sejak awal kemerdekaan. Data KKP menunjukkan bahwa jumlah nelayan Indonesia mencapai lebih dari 2,7 juta orang, namun sebagian besar masih berada dalam kategori rentan

secara ekonomi.

Program berbasis kampung nelayan sendiri mulai digencarkan pemerintah sejak dekade 2010-an sebagai bagian dari transformasi pembangunan maritim nasional, sejalan dengan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Di tingkat global, konsep pengembangan komunitas nelayan berbasis kawasan juga telah diterapkan di berbagai negara, seperti Jepang dan Norwegia, yang menekankan integrasi antara infrastruktur, koperasi, dan teknologi perikanan modern untuk meningkatkan daya saing nelayan lokal.

Model tersebut terbukti mampu meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya laut melalui pendekatan berbasis komunitas. (*)

Momentum Hardiknas, Disdik Buton Selatan Fokus Pembelajaran dan Revitalisasi

aspek tata kelola pendidikan juga menjadi perhatian serius agar sistem yang berjalan di sekolah lebih efisien dan akuntabel.

Dalam hal ini, pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ditegaskan harus mengedepankan prinsip transparansi dan keadilan bagi seluruh masyarakat.

"Penerimaan siswa baru harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, sesuai dengan aturan yang berlaku," tegas Amiru.

Di sisi lain, upaya peningkatan mutu pendidikan juga dilakukan melalui program revitalisasi sekolah yang mendapat dukungan dari pemerintah pusat.

Pada tahun 2026, sejumlah sekolah di Buton Selatan memperoleh bantuan rehabilitasi bangunan hingga pembangunan ruang kelas baru dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Langkah ini dinilai penting untuk men-

ciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi siswa serta tenaga pendidik.

Tak hanya pembangunan fisik, transformasi pendidikan juga diarahkan pada pemanfaatan teknologi digital di ruang kelas.

Setiap sekolah sebelumnya telah menerima satu unit papan interaktif digital, dan pada tahun ini direncanakan penambahan tiga unit tambahan.

"Jika program ini berjalan sesuai rencana, maka setiap sekolah akan memiliki empat papan digital untuk menunjang proses pembelajaran," jelasnya.

Bahkan, pemerintah pusat menargetkan penambahan dua unit lagi pada 2027, sehingga setiap ruang kelas di tingkat SD diharapkan telah dilengkapi perangkat digital.

Penggunaan teknologi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pembelajaran serta mendorong siswa lebih aktif dalam memahami materi.

"Ke depan, setiap kelas akan memiliki papan digital yang dapat membantu guru dan siswa dalam proses belajar yang lebih interaktif," tambah Amiru.

Program ini juga sejalan dengan upaya peningkatan kompetensi dasar siswa, khususnya dalam bidang literasi dan numerasi yang menjadi indikator penting dalam sistem pendidikan global.

Secara historis, Hari Pendidikan Nasional yang diperingati setiap 2 Mei merujuk pada kelahiran Ki Hajar Dewantara, pelopor pendidikan nasional yang menekankan pentingnya akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Di tingkat global, dorongan peningkatan literasi dan numerasi juga sejalan dengan agenda UNESCO melalui program Education for All serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang menempatkan pendidikan berkualitas sebagai prioritas

utama.

Literasi dalam konteks pendidikan modern tidak hanya sebatas kemampuan membaca, tetapi juga mencakup kemampuan memahami dan menganalisis informasi secara kritis.

Sementara numerasi berkaitan dengan kemampuan berpikir logis serta pemecahan masalah berbasis angka dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui momentum Hardiknas 2026, pemerintah daerah berharap seluruh elemen masyarakat turut berperan aktif dalam memajukan pendidikan di daerah.

"Selamat Hari Pendidikan Nasional. Tema tahun ini adalah 'Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua' tutup Amiru.

Upaya tersebut diharapkan mampu membawa sistem pendidikan di Buton Selatan menjadi lebih adaptif, inklusif, dan berdaya saing, baik di tingkat nasional maupun global. (*)

445 WBP dan Pegawai Lapas Baubau Ikuti Skrining Kesehatan Massal Untuk Cegah Penyakit Menular

fisik berupa pengukuran Indeks Massa Tubuh (IMT) dan tekanan darah, serta pemeriksaan laboratorium seperti gula darah, hepatitis C, sifilis, dan HIV.

Selain itu, dilakukan pula deteksi dini tuberkulosis (TBC) sebagai langkah antisipasi terhadap potensi penyebaran penyakit menular di lingkungan dengan tingkat hunian tinggi.

Kegiatan ini juga mencakup inspeksi kesehatan lingkungan pada sarana dapur Lapas guna memastikan standar kebersihan dan sanitasi terpenuhi.

Para peserta turut mendapatkan edukasi kesehatan melalui sosialisasi pola hidup sehat untuk mencegah

penyebaran penyakit di lingkungan padat hunian.

Sebagai bagian dari penguatan layanan kesehatan berkelanjutan, pada hari pertama kegiatan dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kepala Lapas Kelas IIA Baubau Abdul Waris, A.Md. IP., S.H., M.H., dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Baubau.

Menurut dr. Frederik, kerja sama tersebut merupakan wujud komitmen bersama dalam menjamin terpenuhinya hak kesehatan warga binaan selama menjalani masa pembinaan.

Ia menegaskan bahwa Dinas Kesehatan akan terus memberikan pelayanan optimal guna menciptakan

lingkungan Lapas yang sehat dan mendukung proses pembinaan.

Sementara itu, Kepala Lapas Baubau Abdul Waris menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini sebagai langkah strategis dalam menjaga kesehatan dan kondusivitas lingkungan Lapas.

Ia menilai bahwa melalui deteksi dini, potensi penyebaran penyakit di dalam blok hunian dapat ditekan secara signifikan.

Dengan adanya skrining kesehatan massal ini, diharapkan seluruh warga binaan dan pegawai Lapas Baubau dapat menjalani aktivitas dengan kondisi kesehatan yang lebih baik serta meningkatkan kualitas hidup di lingkungan masyarakat. (*)

Megawati Pertanyakan Jalur Hukum Kasus Penyiraman Air Keras Aktivistis



Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dikenal pula sebagai Presiden kelima RI. Dia juga adalah putri dari Presiden pertama RI yang juga proklamator kemerdekaan, Sukarno.

Laporan: Alwan

J A K A R T A , BP-Proses hukum kasus penyiraman air keras terhadap aktivis HAM Andrie Yunus yang disidangkan di pengadilan militer menuai sorotan dari Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. Ia mempertanyakan dasar pemilihan jalur hukum tersebut, terutama terkait prinsip kesetaraan warga negara di hadapan hukum.

Sorotan itu disampaikan Megawati dalam Sidang Senat Pengukuhan Profesor Emeritus Arief Hidayat di Universitas Borobudur, Sabtu (2/5). Dalam forum akademik tersebut, Megawati menyinggung aspek fundamental keadilan dalam sistem hukum Indonesia.

"Saya prihatin sekali yang masalah anak yang disiram air keras. Saya lihat kok lucu ya," ujar Megawati dalam pidatonya.

Kasus ini melibatkan empat anggota TNI yang kini diadili di Pengadilan Militer II-08 Jakarta. Mereka berasal dari unsur perwira hingga bintara, yang seluruhnya diduga terlibat dalam aksi penyiraman terhadap korban.

Keempat terdakwa tersebut adalah Kapten Nandala Dwi Prasetya, Serda Edi Sudarko, Lettu Budhi Hariyanto, dan Lettu Sami Lakka. Sidang perdana telah digelar dengan menghadirkan seluruh terdakwa secara terbuka untuk pertama kalinya sejak kasus mencuat.

Majelis hakim yang menangani perkara ini dipimpin oleh Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto, dengan anggota Letnan Kolonel Kum Irwan Tasri dan Mayor Laut (H) M. Zainal Abidin.

Megawati kemudian mempertanyakan secara terbuka dasar kewenangan pengadilan militer dalam menangani perkara tersebut. Ia mengajak para ahli hukum untuk menjawab persoalan itu secara objektif.

"Apakah harus pengadilan militer ataukah pengadilan sipil? Tolong dijawab," katanya.

Lebih jauh, ia juga menyinggung hak korban dalam menentukan jalur hukum yang ditempuh. Menurutnya, aspek ini jarang menjadi perhatian dalam praktik peradilan di Indonesia.

"Bolehkah korban meminta pengadilan yang dia inginkan? Kok tiba-tiba masuk ke pengadilan militer? Pusing saya," ujarnya.

Megawati menegaskan bahwa konstitusi menjamin kesetaraan setiap warga negara di hadapan hukum tanpa memandang latar belakang sosial maupun kondisi personal.

"Setiap warga negara mempunyai hak yang sama di mata hukum," tegasnya.

Di sisi lain, Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) bersama koalisi masyarakat sipil menyatakan penolakan terhadap jalur peradilan

militer. Mereka bahkan tidak menghadiri sidang perdana sebagai bentuk protes atas mekanisme yang dinilai tidak transparan.

Perwakilan TAUD menyebut sejak awal korban dan tim pendamping menolak penanganan perkara ini dilakukan di pengadilan militer, karena dinilai berpotensi mengurangi akuntabilitas publik.

Sementara itu, pihak oditur militer menjerat para terdakwa dengan pasal berlapis terkait penganiayaan berat yang direncanakan. Ancaman hukuman berkisar antara empat hingga 12 tahun penjara, tergantung tingkat perencanaan dan dampak luka yang ditimbulkan.

Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto, menegaskan bahwa peradilan militer merupakan jalur yang sah berdasarkan hukum yang berlaku saat ini. Ia menyatakan seluruh unsur perkara memenuhi yurisdiksi militer.

Menurutnya, apabila perkara dialihkan ke pengadilan umum, terdapat kemungkinan proses hukum tidak dapat berjalan karena persoalan kewenangan.

Perdebatan mengenai yurisdiksi ini bukan kali pertama terjadi di Indonesia. Dalam kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Novel Baswedan pada

2017, pelaku yang berasal dari institusi kepolisian diadili di pengadilan umum, sehingga memunculkan perbandingan dalam penanganan kasus serupa.

Secara historis, sistem peradilan militer di Indonesia memiliki akar sejak masa kolonial Belanda dan terus dipertahankan dengan berbagai penyesuaian. Namun, dalam era reformasi, tuntutan transparansi dan akuntabilitas semakin menguat, termasuk dorongan agar kasus yang melibatkan warga sipil ditangani di pengadilan umum.

Di tingkat global, praktik serupa juga menjadi perdebatan. Sejumlah negara demokratis seperti Amerika Serikat dan Inggris membatasi kewenangan pengadilan militer, terutama untuk kasus yang berdampak pada warga sipil, guna menjaga prinsip keadilan terbuka.

Kasus yang menimpa Andrie Yunus kini menjadi titik krusial dalam diskursus hukum nasional, terutama terkait batas kewenangan pengadilan militer dan perlindungan hak korban.

Perkembangan perkara ini diperkirakan akan terus menjadi perhatian publik, seiring meningkatnya tuntutan transparansi serta keadilan yang setara bagi seluruh warga negara. (*)

DPR hingga Komnas HAM Kritik Tim Asesor, Pigai Luruskan Isu

JAKARTA, BP-Rencana pembentukan tim asesor untuk menilai pihak yang berhak memperoleh perlindungan sebagai pembela hak asasi manusia (HAM) dalam revisi Undang-Undang HAM memicu polemik di ruang publik. Kritik datang dari DPR RI, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, hingga organisasi masyarakat sipil, sementara Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan kebijakan tersebut bertujuan memperkuat perlindungan hukum.

Pigai menyatakan, polemik bermula dari kesalahpahaman atas gagasan pembentukan tim asesor. Ia menegaskan bahwa tim tersebut tidak dimaksudkan untuk menentukan status seseorang sebagai aktivis HAM. "Judul yang beredar itu keliru dan bisa menimbulkan persepsi yang salah. Saya justru memastikan perlindungan maksimal bagi pembela HAM agar tidak dipidana," ujarnya di Jakarta, Kamis (30/4).

Menurut Pigai, pendekatan yang dirancang dalam kebijakan itu berbasis pada konteks tindakan, bukan label individu. Penilaian dilakukan terhadap aktivitas pembelaan HAM dalam suatu peristiwa untuk memastikan perlindungan diberikan secara tepat sasaran.

Ia menjelaskan, mekanisme tersebut diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan klaim sebagai aktivis HAM oleh pihak yang memiliki kepentingan pribadi atau komersial. "Perlindungan, termasuk imunitas, hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar membela kepentingan publik, terutama kelompok rentan," katanya.

Namun, gagasan tersebut mendapat respons kritis dari berbagai pihak. Komnas HAM menilai rencana pembentukan tim asesor berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, terutama jika negara menjadi pihak yang dilaporkan oleh pembela HAM.

Komisioner Komnas HAM, Pramono Ubaid Tanthowi, menegaskan bahwa ancaman terhadap aktivis kerap melibatkan

oknum pejabat atau institusi negara. "Menjadi pertanyaan, apakah Kementerian HAM dapat bersikap objektif ketika ancaman terhadap pembela HAM melibatkan aparat negara," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/5).

Komnas HAM berpandangan bahwa menjadi aktivis atau bersikap kritis merupakan bagian dari kebebasan dasar warga negara yang harus dihormati tanpa intervensi negara. Dalam prinsip HAM, negara memiliki kewajiban non-interference atau tidak mencampuri hak tersebut secara berlebihan.

Dari kalangan legislatif, kritik disampaikan anggota DPR RI, Marinus Gea. Ia menilai rencana pemerintah berpotensi mengganggu prinsip kebebasan sipil dan menciptakan konflik kepentingan.

"Aktivis HAM itu mengawasi kekuasaan, termasuk pemerintah. Jika pemerintah yang menyeleksi, ini cacat logika," kata Marinus. Ia menambahkan bahwa aktivis HAM lahir dari kesadaran individu dan kebebasan berekspresi, bukan dari legitimasi negara.

Marinus juga mengingatkan bahwa keterlibatan negara dalam menentukan status aktivis berpotensi mengubah hak menjadi privilege. Dalam sistem demokrasi, menurutnya, kritik warga merupakan elemen penting untuk menjaga arah kekuasaan.

Kritik serupa disampaikan oleh Amnesty International Indonesia. Organisasi ini menilai rencana tersebut sebagai langkah mundur dalam perlindungan HAM dan berpotensi membatasi ruang sipil.

Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, Wiryadi Adiwena, menyatakan bahwa negara tidak memiliki legitimasi untuk menentukan siapa yang dapat disebut sebagai pembela HAM. "Status pembela HAM melekat pada tindakan dan komitmen, bukan pada validasi administratif pemerintah," ujarnya.

Secara historis, perdebatan mengenai peran negara dalam menentukan atau mengatur aktivitas mas-

yarakat sipil bukan hal baru. Pada masa Orde Baru di Indonesia, dikenal praktik penelitian khusus (litsus) yang digunakan untuk menyaring individu berdasarkan loyalitas politik, yang kemudian dikritik sebagai bentuk pembatasan kebebasan sipil.

Di tingkat global, standar perlindungan pembela HAM telah diatur dalam Deklarasi Pembela HAM yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1998. Deklarasi tersebut menegaskan bahwa setiap individu berhak memperjuangkan dan melindungi HAM tanpa harus mendapatkan pengakuan formal dari negara.

Dalam konteks Indonesia, perlindungan terhadap pembela HAM juga telah diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Namun, berbagai kasus kriminalisasi terhadap aktivis masih menjadi perhatian publik hingga saat ini.

Pigai menegaskan bahwa revisi UU HAM yang tengah disiapkan pemerintah justru bertujuan memperkuat perlindungan tersebut. Ia menyebutkan bahwa salah satu poin penting dalam revisi adalah jaminan bahwa pembela HAM tidak dapat dipidana saat menjalankan tugas kemanusiaan.

Ia menambahkan bahwa tim asesor hanya akan berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan perlindungan diberikan secara tepat, bukan sebagai alat untuk membatasi atau menentukan status aktivis.

Rancangan revisi Undang-Undang HAM tersebut saat ini telah disusun oleh Kementerian HAM dan direncanakan akan segera disampaikan kepada DPR RI untuk dibahas lebih lanjut. Polemik yang muncul diharapkan menjadi bagian dari proses demokrasi dalam merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif dan berimbang.

Di tengah perdebatan tersebut, sejumlah pihak menilai pentingnya menjaga keseimbangan antara perlindungan hukum dan kebebasan sipil, agar upaya memperkuat HAM tidak justru berujung pada pembatasan ruang partisipasi masyarakat. (*)

Kunjungan Gubernur dan KASAU Warnai Pameran Pembangunan Sultra Soroti Potensi Daerah



Penyelenggaraan pameran pembangunan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi panggung utama promosi potensi daerah,

Laporan: Lisna

SULTRA, BP - Penyelenggaraan pameran pembangunan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi panggung utama promosi potensi daerah, yang ditinjau langsung oleh Gubernur Sultra Andi Sumangerukka bersama Kepala Staf Angkatan Udara M. Tonny Harjono di Venue Utama MTQ Kendari, Minggu (26 April 2026).

Kunjungan tersebut memperlihatkan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong penguatan ekonomi lokal berbasis produk unggulan dari seluruh kabupaten dan kota di wilayah Sulawesi Tenggara.

Sebanyak 17 kabupaten/kota ambil bagian dalam pameran ini dengan menghadirkan beragam produk khas, mulai dari hasil pertanian, kerajinan tangan, kain tenun tradisional, hingga produk olahan bernilai tambah yang mencerminkan identitas lokal.

Rombongan juga menyambangi sejumlah stan daerah seperti Kota Baubau, Kabupaten Buton Utara, Kolaka Timur, Buton Tengah, Kolaka Utara, Konawe Kepulauan, dan Ka-

bupaten Muna yang menampilkan inovasi dan keunggulan masing-masing.

"Pameran ini bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi etalase potensi daerah yang harus terus kita dorong agar mampu bersaing di tingkat nasional," ujar Andi Sumangerukka dalam keterangannya di sela kunjungan.

Selain pemerintah daerah, sejumlah instansi turut berpartisipasi, termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta unsur TNI, di antaranya TNI Angkatan Laut, yang memperkaya ragam informasi dan inovasi dalam pameran tersebut.

KASAU M. Tonny Harjono menilai kegiatan ini sebagai bentuk sinergi antara pemerintah dan berbagai elemen dalam memperkuat pembangunan daerah. "Kolaborasi seperti ini penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memperkenalkan potensi lokal ke khalayak luas," katanya.

Kegiatan ini juga dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sultra, Ketua TP PKK Sultra, serta Wali Kota Kendari bersama sejumlah pe-

jabat terkait lainnya.

Secara historis, pameran pembangunan telah menjadi bagian penting dalam strategi promosi daerah di Indonesia sejak era Orde Baru, ketika pemerintah mulai mendorong eksposisi hasil pembangunan sebagai sarana edukasi dan promosi ekonomi kepada masyarakat luas.

Di tingkat global, konsep serupa telah berkembang sejak penyelenggaraan Great Exhibition 1851 di London, Inggris, yang menjadi cikal bakal pameran internasional atau World Expo sebagai ajang unjuk inovasi dan kemajuan suatu wilayah.

Dalam konteks nasional, kegiatan pameran seperti ini sejalan dengan agenda pemerintah untuk memperkuat UMKM sebagai tulang punggung ekonomi, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi dan persaingan pasar bebas.

"Produk-produk lokal kita memiliki kualitas yang tidak kalah. Tinggal bagaimana kita memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saingnya," tambah Gubernur.

bernur.

P e n i n j a u a n tersebut juga menjadi sarana dialog langsung antara pemerintah dan pelaku usaha lokal guna menggali tantangan yang dihadapi, mulai dari produksi hingga pemasaran.

Melalui pameran ini, pemerintah berharap tercipta multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk peningkatan investasi, pariwisata, dan daya saing produk lokal.

M o m e n t u m HUT ke-62 Sulawesi Tenggara pun diharapkan menjadi titik tolak untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

"Ini momentum untuk memperkenalkan Sultra ke dunia, sekaligus memperkuat kebanggaan terhadap produk lokal," ujar Tonny Harjono.

D e n g a n mengedepankan kekayaan budaya dan potensi ekonomi, pameran ini tidak hanya menjadi ajang promosi, tetapi juga refleksi perjalanan pembangunan Sulawesi Tenggara selama lebih dari enam dekade.*

Harmoni Sultra 2026 Ditutup, Kolaborasi Jadi Kunci Pembangunan Daerah



SULTRA, BP- Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Dr. Ir. Hugua, menegaskan pentingnya harmoni sebagai fondasi utama pembangunan daerah saat menutup secara resmi rangkaian kegiatan Harmoni Sultra 2026 di Lapangan Ex-MTQ Kendari, Senin (27/4/2026).

Penegasan tersebut disampaikan dalam momentum penutupan peringatan Hari Ulang Tahun ke-62 Provinsi Sulawesi Tenggara yang dirangkaikan dengan berbagai kegiatan partisipatif masyarakat selama beberapa hari terakhir.

"Harmoni bukan sekadar konsep, tetapi menjadi kekuatan nyata dalam menyatukan langkah pemerintah dan masyarakat untuk membangun daerah," ujar Hugua dalam sambutannya.

Ia menjelaskan, keberhasilan pelaksanaan Harmoni Sultra 2026 tidak terlepas dari sinergi berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, Forkopimda, pelaku usaha, hingga masyarakat umum yang berpartisipasi aktif.

Kegiatan ini, lanjutnya, tidak hanya menjadi ajang hiburan, melainkan juga sarana strategis dalam menyampaikan berbagai program pembangunan serta capaian pemerintah daerah kepada publik secara terbuka.

Dalam perspektif yang lebih luas, Hugua menilai harmoni mencerminkan keseimbangan antara aspek sosial, budaya, spiritual, hingga ilmu pengetahuan yang saling terhubung dalam kehidupan masyarakat modern.

"Kita melihat bagaimana generasi muda, khususnya generasi Z, tampil menunjukkan kreativitasnya. Ini menjadi sinyal kuat bahwa daerah ini memiliki potensi besar untuk bersaing di tingkat global," katanya.

Ia menambahkan, berbagai kompetisi yang digelar selama kegiatan berlangsung tidak hanya melahirkan pemenang, tetapi juga memperkuat nilai kebersamaan dan kerja sama lintas sektor.

Dalam konteks lokal, Hugua mengajak masyarakat untuk terus menjaga nilai-nilai kearifan lokal seperti Kalosara, Buton, Moronene, dan Muna sebagai landasan dalam membangun karakter masyarakat yang inklusif dan berdaya saing. "Nilai-nilai lokal itu harus tetap menjadi ruh dalam setiap proses pembangunan kita," ucapnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Sains dan Teknologi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Prof. Ahmad Najib Burhani, menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan Harmoni Sultra 2026 yang dinilai mampu mendorong partisipasi generasi muda.

Ia menyoroti berbagai lomba yang digelar, seperti esai, video pendek, dan kreasi inovatif, sebagai sarana efektif dalam menumbuhkan daya pikir kritis dan kreativitas

anak muda.

"Partisipasi generasi muda dalam kegiatan seperti ini sangat penting untuk membangun ekosistem inovasi di daerah," ujar Burhani.

Lebih jauh, ia mengungkapkan bahwa pemerintah pusat tengah membangun SMA Unggul Garuda di Kabupaten Konawe Selatan sebagai bagian dari strategi nasional dalam mencetak sumber daya manusia unggul di bidang STEM.

Sekolah tersebut, menurutnya, akan memberikan beasiswa penuh kepada siswa, mencakup biaya pendidikan hingga kebutuhan hidup, serta menerapkan kurikulum nasional, penguatan STEM, kurikulum internasional (IB), dan sistem asrama berbasis karakter.

Ia menyebutkan, pembangunan sekolah tersebut telah mencapai sekitar 25 persen dan ditargetkan mulai beroperasi pada pertengahan tahun 2026.

"Ini adalah investasi jangka panjang untuk memastikan Indonesia memiliki talenta unggul yang mampu bersaing secara global," katanya.

Dalam rangkaian penutupan, pemerintah juga memberikan penghargaan kepada sejumlah perangkat daerah dan tokoh penggerak ekonomi kreatif atas kontribusi mereka dalam mendorong inovasi di Sulawesi Tenggara.

Kategori inovasi pengembangan dimenangkan oleh Dinas Kominfo Sultra, disusul BRIDA, Dinas Pariwisata, dan Dinas Lingkungan Hidup. Sementara kategori inovasi baru diraih DPMPTSP Sultra, diikuti RS Jiwa, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Dinas Perhubungan.

Pada kategori indeks pengelolaan keuangan daerah, Kabupaten Konawe Kepulauan menempati peringkat pertama, diikuti Konawe Utara, Buton, Buton Selatan, dan Bombana.

Secara historis, konsep harmoni dalam pembangunan bukan hal baru. Di tingkat nasional, prinsip persatuan dalam keberagaman telah menjadi fondasi sejak masa awal kemerdekaan Indonesia yang dirumuskan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Di tingkat global, konsep harmoni sosial juga menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan berkelanjutan yang diusung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), khususnya dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang menekankan kolaborasi lintas sektor.

Penutupan Harmoni Sultra 2026 turut dihadiri oleh anggota DPR RI dan DPD RI, jajaran Forkopimda, para kepala daerah se-Sulawesi Tenggara, pimpinan instansi vertikal, BUMD, serta perwakilan sektor perbankan.

Dengan berakhirnya kegiatan ini, pemerintah daerah berharap semangat kebersamaan dan kolaborasi yang telah terbangun dapat terus dipertahankan dalam upaya mewujudkan Sulawesi Tenggara yang maju, aman, sejahtera, dan religius. (Mashuri)

Bupati Buton Alvin Raih Penghargaan Nasional pada HBP ke-62



Pemerintah Kabupaten Buton memperoleh pengakuan di tingkat nasional setelah Bupati Buton, Alvin Akawijaya Putra, dianugerahi penghargaan sebagai Stakeholder Berkontribusi III

Pewartu: La Harman

BUTON, BP-Pemerintah Kabupaten Buton memperoleh pengakuan di tingkat nasional setelah Bupati Buton, Alvin Akawijaya Putra, dianugerahi penghargaan sebagai Stakeholder Berkontribusi III dalam peringatan Hari Bhakti Pemasaryakatan (HBP) ke-62 Tahun 2026.

Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasaryakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasaryakatan Republik Indonesia Nomor PAS-658.SA.05.03 Tahun 2026, sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi pemerintah daerah dalam mendukung sistem pemasaryakatan.

Momentum penghargaan itu berlangsung dalam kegiatan tasyakuran yang dipusatkan di Aula Lembaga Pemasaryakatan Kelas IIA Baubau, Senin (27/4/2026), yang diikuti secara daring oleh seluruh kantor wilayah dan unit pelaksana teknis pemasaryakatan di Indonesia.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Buton diwakili oleh Wakil Bupati Buton, Syarifudin Saafa, yang hadir bersama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton, Nur Iskandar.

Wakil Bupati menegaskan bahwa penghargaan ini mencerminkan hasil kerja sama lintas sektor antara pemerintah daerah dan lembaga pemasaryakatan dalam meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan.

"Penghargaan ini bukan hanya milik pemerintah daerah, tetapi juga hasil sinergi seluruh pihak dalam mendukung pembinaan yang lebih manusiawi dan berintegritas," ujar Syarifudin dalam sambutannya.

Ia menambahkan bahwa lembaga pemasaryakatan memiliki peran strategis dalam membentuk kembali karakter warga binaan agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Buton, kami mengucapkan selamat Hari Bhakti Pemasaryakatan ke-62. Kolaborasi akan terus kami perkuat demi pelayanan publik yang lebih baik," katanya.

Kegiatan yang dimulai pukul 10.30 WIB tersebut juga menjadi ruang refleksi terhadap perjalanan panjang sistem pemasaryakatan di Indonesia, yang secara historis mulai diperkenalkan sejak perubahan paradigma kepenjaraan menjadi pemasaryakatan pada 1964. Secara nasional,

Hari Bhakti Pemasaryakatan diperingati setiap 27 April sebagai tonggak transformasi sistem pemidanaan di Indonesia yang mengedepankan pendekatan pembinaan dibandingkan penghukuman semata.

Dalam konteks global, pendekatan serupa juga berkembang di berbagai negara, seperti Norwegia dan Belanda, yang menekankan rehabilitasi narapidana sebagai bagian dari sistem keadilan modern.

Di Indonesia sendiri, reformasi pemasaryakatan terus berkembang, termasuk melalui program pembinaan kemandirian dan integrasi sosial bagi warga binaan yang bertujuan menekan angka residivisme.

Rangkaian acara tasyakuran HBP ke-62 di Baubau turut dihadiri unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Baubau dan Kabupaten Buton, yang menunjukkan dukungan lintas institusi terhadap sistem pemasaryakatan.

Acara berlangsung khidmat sekaligus meriah dengan pemotongan tumpeng sebagai simbol rasa syukur, serta penampilan hiburan dari warga binaan secara virtual.

"Partisipasi warga binaan dalam kegia-

tan ini menunjukkan bahwa proses pembinaan berjalan dengan baik dan memberikan ruang ekspresi positif," ujar salah satu panitia kegiatan.

Selain itu, kegiatan ini juga mencerminkan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada transparansi, integritas, dan kepuasan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Buton berharap penghargaan ini menjadi pemicu kerja sama yang telah terjalin dengan jajaran pemasaryakatan di berbagai level.

"Ke depan, kami ingin memastikan bahwa sinergi ini tidak berhenti pada seremoni, tetapi berlanjut dalam program nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat," kata Syarifudin.

Peringatan HBP ke-62 sendiri mencakup berbagai agenda, mulai dari upacara, pameran karya warga binaan, hingga refleksi kinerja nasional pemasaryakatan.

Melalui momentum ini, diharapkan sistem pemasaryakatan Indonesia semakin adaptif terhadap tantangan zaman, sekaligus mampu menjalankan fungsi rehabilitasi sosial secara optimal. (*)

Kartini ke-147, Buton Tengah Perkuat Peran Perempuan Menuju 2045



Laporan: Ardi

BUTON TENGAH, BP- Peringatan Hari Kartini ke-147 di Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, menjadi momentum penguatan peran perempuan dalam pembangunan daerah, Kamis (30/4/2026). Kegiatan yang digelar di Aula Pancana, Lantai 5 Kantor Bupati itu mengusung tema "Perempuan Berdaya, Anak Terlindungi, Menuju Indonesia Emas 2045"

Bupati Buton Tengah, Dr. Azhari, menegaskan bahwa perempuan memiliki posisi strategis dalam menentukan arah pembangunan, baik di tingkat keluarga maupun masyarakat luas. Ia menyebut pemberdayaan perempuan menjadi salah satu kunci dalam menciptakan kesejahteraan daerah.

"Perempuan tidak hanya berperan di rumah tangga, tetapi juga memiliki andil besar dalam kehidupan sosial dan pembangunan. Ini harus terus kita dorong," ujar Azhari dalam sambutannya.

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua TP- PKK Umi Noranah Azhari, Wakil Bupati Muh. Adam Basan, unsur Forkopimda, Kapolres Wahyu Adi Waluyo, Kepala Kankemenag Abdul Rahman Jaya, serta pimpinan OPD dan organisasi wanita.

Berbagai organisasi perempuan turut berkolaborasi dalam kegiatan ini, antara lain Tim Penggerak PKK, Bhayangkari Polres Buton Tengah, Persit Kartika Cendrakirana 1413 Buton, Dharma Wanita Kementerian Agama, serta Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Buton Tengah.

Dalam kesempatan itu, Azhari menekankan bahwa peringatan Hari Kartini

tidak boleh sekadar menjadi seremoni tahunan. Ia menilai, momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat kapasitas perempuan agar mampu berkontribusi dalam pembangunan ekonomi dan sosial.

Pemerintah daerah, kata dia, telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mendorong kemandirian perempuan, di antaranya melalui pengembangan sektor pariwisata, ekonomi pesisir, budidaya perairan, hingga usaha kuliner berbasis lokal.

"Kita ingin perempuan ikut aktif, termasuk membuka usaha yang mendukung sektor pariwisata daerah. Ini peluang yang harus dimanfaatkan," kata Azhari.

Sementara itu, Ketua TP-PKK Buton Tengah, Umi Noranah Azhari, menyampaikan bahwa perempuan berdaya merupakan fondasi penting dalam membangun generasi masa depan yang berkualitas.

"Perempuan yang tangguh dan mandiri secara ekonomi akan melahirkan generasi yang kuat. Ini menjadi kunci menuju Indonesia Emas 2045," ujarnya.

Secara historis, peringatan Hari Kartini di Indonesia berakar dari perjuangan Raden Ajeng Kartini yang memperjuangkan emansipasi perempuan pada awal abad ke-20. Gagasan Kartini tentang kesetaraan pendidikan kemudian menjadi tonggak penting dalam perkembangan peran perempuan Indonesia modern.

Di tingkat nasional, semangat Kartini sejalan dengan kiprah tokoh perempuan seperti Cut Nyak Dien, Malahayati, dan Martha Christina Tiahahu yang menunjukkan bahwa perempuan

memiliki kontribusi besar dalam sejarah perjuangan bangsa.

Secara global, gerakan pemberdayaan perempuan juga menguat sejak abad ke-20, ditandai dengan lahirnya berbagai kesepakatan internasional seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang mendorong kesetaraan gender di berbagai negara.

Bupati Azhari juga menyinggung pentingnya menjadikan tokoh lokal sebagai inspirasi, seperti Wa Ode Wao, yang dinilai memiliki peran dalam sejarah dan budaya masyarakat Buton.

Ia menilai, keteladanan para tokoh tersebut perlu terus dihidupkan sebagai motivasi bagi perempuan masa kini untuk berkontribusi lebih luas dalam pembangunan daerah.

Melalui peringatan ini, Pemerintah Kabupaten Buton Tengah berharap perempuan tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang aktif dan produktif dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi ruang konsolidasi organisasi perempuan untuk memperkuat sinergi dalam mendukung program pemerintah daerah, khususnya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dengan semangat Kartini, perempuan Buton Tengah diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan yang berkelanjutan, serta berperan dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, religius, dan berdaya saing. (*)

87 Calon Jamaah Haji Baubau Ikuti Tes Fisik, Dinkes Tekankan Pentingnya Stamina



Peliput: Andina L

BAUBAU, BP-Pemerintah Kota Baubau memastikan kesiapan fisik calon jamaah haji (CJH) menjelang musim haji 1447 Hijriah/2026 Masehi melalui pelaksanaan tes kebugaran jasmani yang digelar di Pelataran Kotamara, Jumat (1/5/2026). Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam rangkaian pemeriksaan kesehatan wajib sebelum keberangkatan ke Tanah Suci.

Tes kebugaran tersebut diikuti oleh 87 CJH dari total 137 jamaah asal Kota Baubau. Pemeriksaan dimulai sejak pukul 06.00 WITA dan berlangsung tertib di bawah pengawasan tenaga medis dari Dinas Kesehatan Kota Baubau.

Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Baubau melalui Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Djainudin Ishak, menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan fisik jamaah agar mampu menjalani rangkaian ibadah haji yang membutuhkan ketahanan stamina tinggi.

"Kegiatan ini adalah bentuk komitmen

kami untuk memastikan jamaah dapat beribadah dengan aman dan sehat. Fisik yang tangguh menjadi kunci utama dalam menjalankan ibadah haji," ujar Djainudin dalam keterangannya.

Dalam pelaksanaannya, tim medis yang terdiri dari dokter, perawat, serta tenaga Kesehatan Kerja dan Olahraga (Kesjaor) menerapkan metode Tes Rockport. Metode ini digunakan untuk mengukur kemampuan kardiovaskular melalui aktivitas jalan cepat atau lari ringan dalam jarak tertentu.

Hasil pemantauan menunjukkan bahwa sebagian besar CJH berada dalam kondisi sehat dan bugar. Mayoritas peserta dinyatakan memenuhi syarat fisik untuk diberangkatkan sesuai jadwal yang telah ditetapkan pemerintah.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan, kondisi umum jamaah cukup baik. Ini menjadi indikator positif bahwa mereka siap menjalani ibadah haji," kata Djainudin.

Seluruh hasil pemeriksaan kesehatan tersebut langsung diinput ke dalam Sistem Informasi Kesehatan Haji (SIKH) milik Ke-

menterian Kesehatan Republik Indonesia. Data ini menjadi dokumen resmi yang digunakan dalam proses administrasi keberangkatan jamaah.

Meski demikian, Dinas Kesehatan tetap memberikan sejumlah catatan kepada para jamaah untuk menjaga kondisi tubuh, antara lain dengan mengatur pola makan, menjaga asupan gizi, serta rutin melakukan aktivitas fisik ringan hingga waktu keberangkatan.

"Kami mengimbau jamaah untuk tetap disiplin menjaga kesehatan. Persiapan tidak hanya berhenti pada tes ini, tetapi berlanjut hingga hari keberangkatan," ujarnya.

Selain itu, petugas kesehatan juga diminta untuk terus melakukan pemantauan secara intensif terhadap kondisi jamaah serta memperbarui data kesehatan secara berkala di sistem nasional.

Secara historis, perhatian terhadap kesehatan jamaah haji di Indonesia terus mengalami peningkatan sejak era 1970-an, ketika pemerintah mulai menerapkan pemeriksaan kesehatan terintegrasi. Bahkan, sejak tahun 2000-an, penggunaan sistem digital seperti SIKH memperkuat

pengawasan kesehatan jamaah secara nasional.

Di tingkat internasional, Arab Saudi sebagai penyelenggara ibadah haji juga memperketat standar kesehatan jamaah, terutama pascapandemi COVID-19. Pemeriksaan kebugaran menjadi salah satu syarat penting guna menekan risiko penyakit menular dan kelelahan ekstrem selama pelaksanaan ibadah.

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara dengan jumlah jamaah haji terbesar di dunia. Data Kementerian Agama menunjukkan bahwa setiap tahun ratusan ribu jamaah diberangkatkan, sehingga aspek kesehatan menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan ibadah tersebut.

Dengan pelaksanaan tes kebugaran ini, Pemerintah Kota Baubau optimistis seluruh calon jamaah haji dapat berangkat dalam kondisi prima dan mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah dengan lancar.

Kegiatan yang berlangsung lancar dan tertib ini sekaligus menumbuhkan optimisme bagi para CJH Baubau untuk menyoong ibadahnya tahun 2026 dengan kesiapan fisik yang lebih baik. (*)

Kelurahan Bataraguru, Kota Baubau, Juara Kampung KB Sultra, Siap Wakil ke Nasional



B A U B A U , Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) Bataraguru di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, resmi ditetapkan sebagai Juara I Lomba Kampung KB Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2026 dan akan mewakili daerah tersebut pada seleksi tingkat nasional.

Penetapan ini diumumkan setelah melalui proses penilaian menyeluruh oleh tim dari BKKBN Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara yang mengacu pada instrumen evaluasi berbasis data dan sistem digital Kampung KB.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara, Asmar, menyampaikan bahwa keberhasilan ini menjadi bukti nyata penguatan keluarga sebagai fondasi pembangunan daerah. "Prestasi ini menunjukkan bahwa intervensi berbasis keluarga mampu memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Ia menambahkan, Kampung KB Bataraguru dinilai unggul dalam berbagai indikator, mulai dari profil wilayah, implementasi program, hingga dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Penilaian juga mencakup 11 indikator proses, empat indikator output,

dan tiga indikator outcome.

Sementara itu, Kepala DP3AKB Kota Baubau, Abdul Rahman, menjelaskan bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja kolektif berbagai pihak. "Sinergi antara pemerintah, kader, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam membangun Kampung KB yang berkualitas," katanya.

Menurut Abdul Rahman, proses penilaian dilakukan secara komprehensif melalui platform digital Kampung KB yang terintegrasi dengan berbagai sumber data pendukung. Hal ini memastikan transparansi dan objektivitas dalam menentukan pemenang.

Selain Bataraguru sebagai juara pertama, posisi kedua diraih oleh Kampung KB Kalaero di Kabupaten Bombana, sedangkan posisi ketiga ditempati Kampung KB Bungutoko di Kota Kendari.

Selain Bataraguru sebagai juara pertama, posisi kedua diraih oleh Kampung KB Kalaero di Kabupaten Bombana, sedangkan posisi ketiga ditempati Kampung KB Bungutoko di Kota Kendari.

"Kolaborasi ini melahirkan inovasi-inovasi yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup keluarga," tambah Abdul Rahman.

Secara historis, program Kampung

KB merupakan inisiatif nasional yang diluncurkan pemerintah Indonesia melalui BKKBN pada 2016 sebagai upaya memperkuat pembangunan keluarga berbasis wilayah. Program ini mengintegrasikan berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga ekonomi keluarga.

Dalam konteks global, pendekatan pembangunan berbasis keluarga sejalan dengan agenda United Nations melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya pada poin pengentasan kemiskinan, kesehatan yang baik, dan kesejahteraan.

Sejak pertama kali diperkenalkan, Kampung KB telah berkembang di ribuan desa dan kelurahan di Indonesia, menjadi model intervensi sosial yang diakui mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Asmar berharap capaian ini dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain. "Kami berharap keberhasilan Bataraguru dapat direplikasi di wilayah lain untuk menciptakan keluarga yang mandiri dan sejahtera," ujarnya.

Dengan keberhasilan ini, Kampung KB Bataraguru kini bersiap menghadapi seleksi tingkat nasional tahun 2026, membawa harapan besar bagi Sulawesi Tenggara untuk meraih prestasi lebih tinggi di tingkat nasional. (Andina L)

PT FAREN GRAFIKA

Harian Pagi
Baubau Post

KRITIK, LUGAS, DAN INDEPENDEN

Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam melakukan tugas jurnalistik

Dalam Pelaksanaan Tugas, Wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu, masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post

Segala berita yang diterbitkan oleh Baubau Post meruakan tanggung jawab penanggungjawab redaksi

Pemimpin Umum: Fauzan NWA
Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi: Ardi
Redpel: Prasetyo
Korlip: Firman
Redaktur: Kasrun, Rahim
Reporter: Mashuri, Lisna, Asis, Hafid, Amat Jr, Noval, La Harman

Layouter: Ririn
Pracetak: Aditya
Cetak: Jamaludin

Alamat Redaksi/Tata usaha: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01
Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara
Tlp 0402-2014287- Email: baubaupost2019@gmail.com, ardiandina7786@gmail.com

Percetakan: PT Faren Grafika, Alamat: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01
Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara

Penerbit: PT FAREN GRAFIKA
Komisaris: Erna Agule
Direktur Utama: Andina Latief
Manager Keuangan: Nabila DAA
Manager Iklan & Pemasaran: Jamaluddin
Kepala Sirkulasi: Robi
Administrasi: Salvana

Kepala Biro Wakatobi: Risman
Kepala Biro Buton Utara: Kasrun
Kepala Biro Buton: La Harman
Kepala Biro Buton Selatan: Firman
Kepala Biro Buton Tengah: Komarudin
Kepala Biro Sultra: Masuri

Agen Baubau: Jamaluddin
Agen Buton Selatan: Firman
Agen Buton: Samrihan
Agen Buton Utara: Kasrun

Harga dan Langganan: Dalam Kota Baubau 100.000/bulan,
Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim Eceran dalam Kota Baubau Rp 5000/eks

Prabowo Bentuk Satgas Mitigasi PHK, Tegaskan Negara Lindungi Buruh



Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang melanda berbagai negara, Prabowo Subianto menegaskan Indonesia masih berada dalam kondisi relatif stabil.

Laporan: Amran

JAKARTA, BP—Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang melanda berbagai negara, Prabowo Subianto menegaskan Indonesia masih berada dalam kondisi relatif stabil. Pemerintah, menurutnya, telah menyiapkan langkah antisipatif untuk melindungi tenaga kerja dari ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam pidato peringatan Hari Buruh Internasional 2026 yang digelar di Monumen Nasional, Jakarta, Jumat (1/5). Dalam kesempatan itu, ia sekaligus mengumumkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh.

Kebijakan ini dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2026 yang menjadi dasar pembentukan satgas lintas sektor untuk merespons potensi gelombang PHK di dalam negeri.

“Saya sudah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang pembentukan Satuan Tugas Mitigasi Pemutusan

Hubungan Kerja dan Kesejahteraan Buruh,” ujar Prabowo di hadapan ribuan buruh.

Menurut Prabowo, pembentukan satgas tersebut merupakan bentuk kehadiran negara dalam menjamin perlindungan tenaga kerja, khususnya dalam situasi ekonomi global yang tidak menentu.

Ia menekankan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan buruh menghadapi risiko PHK tanpa perlindungan. “Jangan khawatir, kita akan membela kepentingan buruh. Yang diancam PHK, kita akan melindungi,” kata dia.

Lebih jauh, Prabowo menyatakan negara memiliki kapasitas untuk mengambil langkah intervensi jika diperlukan, termasuk mengambil alih perusahaan yang tidak mampu bertahan.

“Kalau ada pengusaha yang menyerah, negara kita akan mengambil alih dan membela rakyat Indonesia,” ujarnya menegaskan.

Secara historis, kebijakan perlindungan tenaga kerja di Indonesia telah berkembang sejak krisis ekonomi

1998 yang memicu gelombang PHK besar-besaran. Pemerintah saat itu mulai memperkuat regulasi ketenagakerjaan, termasuk melalui Undang-Undang Ketenagakerjaan Tahun 2003.

Pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020–2022, pemerintah juga mengeluarkan berbagai program bantuan seperti subsidi upah dan kartu prakerja untuk menahan dampak PHK. Langkah tersebut menjadi preseden penting dalam intervensi negara di sektor ketenagakerjaan.

Secara global, pembentukan satgas atau mekanisme perlindungan tenaga kerja juga dilakukan di sejumlah negara. Amerika Serikat, misalnya, memperkuat program *unemployment benefits* saat krisis, sementara negara-negara Eropa mengembangkan skema *job retention* untuk menjaga tenaga kerja tetap terserap.

Dalam konteks saat ini, Prabowo menilai ketahanan nasional Indonesia menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas ekonomi. Ia menyebut sektor

pangan dan energi sebagai pilar penting yang memperkuat daya tahan tersebut.

Menurutnya, Indonesia telah mencapai swasembada pangan, sehingga ketahanan mampu menjaga ketersediaan kebutuhan pokok di tengah tekanan global.

Selain itu, pemerintah juga terus mendorong kemandirian energi sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada impor.

“Tidak lama lagi kita akan mencapai swasembada energi,” ucap Prabowo optimistis.

Pembentukan Satgas Mitigasi PHK diharapkan dapat menjadi instrumen strategis dalam mencegah lonjakan pengangguran serta menjaga kesejahteraan buruh di tengah dinamika ekonomi global yang terus berkembang.

Dengan langkah tersebut, pemerintah berupaya memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tetap berjalan seiring dengan perlindungan terhadap tenaga kerja sebagai salah satu pilar utama pembangunan nasional. (*)

Kapolres Badung Minta Maaf Usai Video Dugaan Pungli WNA Viral



Kapolres Badung AKBP Joseph Edward Purba saat melakukan konferensi pers

DENPASAR, BP—Kepolisian Resor Badung buka suara terkait video viral yang memperlihatkan dugaan praktik pungutan liar (pungli) oleh dua anggota polisi lalu lintas terhadap seorang warga negara asing (WNA) di Bali. Peristiwa yang terjadi pada Maret 2026 itu kini tengah diperiksa secara internal oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam).

Kapolres Badung AKBP Joseph Edward Purba menyampaikan permohonan maaf kepada publik atas kegaduhan yang ditimbulkan oleh video tersebut. Ia menegaskan bahwa institusinya berkomitmen menjaga profesionalitas serta menindak tegas anggota yang terbukti melanggar aturan.

“Saya selaku pimpinan Polres Badung menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas peristiwa yang viral ini,” ujar Joseph saat memberikan keterangan di Mapolres Badung, Kamis (30/4).

Berdasarkan hasil penelusuran awal, insiden itu terjadi di Simpang Semer, Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Saat itu, dua anggota Polantas tengah bertugas melakukan pengatur lalu lintas.

Mereka kemudian menghentikan seorang WNA yang membongceng warga negara Indonesia (WNI) karena melakukan pelanggaran, yakni menerobos lampu merah dan tidak menggunakan helm.

Dalam rekaman yang beredar, terdengar petugas menjelaskan besaran denda pelanggaran, yakni Rp500 ribu untuk pelanggaran lampu mer-

ah dan Rp250 ribu karena tidak mengenakan helm. Namun, WNA tersebut mengaku hanya memiliki uang tunai Rp200 ribu.

Percakapan antara petugas dan WNA itu terhenti setelah salah satu anggota menyadari adanya kamera yang merekam kejadian tersebut. Video tersebut kemudian menyebar luas di media sosial dan memicu dugaan praktik pungli.

Meski demikian, polisi menegaskan bahwa tidak ada uang yang diterima oleh petugas dalam kejadian tersebut. Kedua pelanggar disebut hanya diberikan teguran lisan tanpa proses penilangan maupun penyitaan.

“Berkaitan dengan peristiwa itu ditegaskan tidak ada penerimaan uang dalam bentuk apa pun oleh petugas,” kata Joseph.

Kapolres juga mengungkapkan bahwa dua anggota yang terlibat berinisial NA dan IGNA, masing-masing berpangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu). Keduanya kini tengah menjalani pemeriksaan oleh unit Pengamanan Internal (Paminal) Propam.

“Hasil pemeriksaan sementara menunjukkan adanya kekeliruan prosedur. Seharusnya pelanggaran tersebut cukup diberikan teguran langsung,” ujarnya.

Ia menambahkan, apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan pelanggaran disiplin atau etik, maka sanksi akan diberikan secara profesional dan proporsional sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, pihak kepolisian juga mendalami latar belakang penyebaran video tersebut. Dari hasil sementara, diketahui bahwa WNA yang terlibat merupakan seorang konten kreator.

“Untuk itu, kami

tetap mendalami apakah ada pelanggaran lain, termasuk dari aspek penyebaran video tersebut,” kata Joseph.

Kasus ini kembali menyoroti pentingnya transparansi dalam penegakan hukum lalu lintas di Indonesia. Secara historis, praktik pungli di sektor pelayanan publik, termasuk lalu lintas, telah menjadi perhatian pemerintah sejak era reformasi 1998.

Pemerintah Indonesia melalui berbagai program, seperti reformasi birokrasi dan digitalisasi tilang elektronik (e-tilang), berupaya meminimalisasi kontak langsung antara petugas dan pelanggar guna mencegah praktik pungli.

Di tingkat global, isu serupa juga menjadi perhatian di berbagai negara berkembang. Laporan organisasi seperti Transparency International kerap menempatkan sektor penegakan hukum lalu lintas sebagai salah satu area rawan korupsi kecil (*petty corruption*).

Dalam konteks tersebut, penggunaan teknologi seperti kamera tilang otomatis dan sistem pembayaran non-tunai telah terbukti efektif di sejumlah negara untuk menekan potensi penyimpangan.

Kapolres Badung menegaskan, institusinya akan terus melakukan pembenaan internal agar kepercayaan publik terhadap kepolisian tetap terjaga.

“Kami berkomitmen memastikan setiap anggota menjalankan tugas sesuai SOP dan menjunjung tinggi nilai-nilai institusi Polri,” ujarnya.

Saat ini, proses pemeriksaan terhadap kedua anggota masih berlangsung, dan hasil akhirnya akan menjadi dasar penentuan sanksi lebih lanjut. (*)

DPRD Serahkan Rekomendasi LKPJ 2025, Wali Kota Baubau H Yusran Fahim Siap Evaluasi



Pemerintah Kota Baubau menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD

Laporan: Firman

BAUBAU, BP-Pemerintah Kota Baubau menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2025 sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kinerja birokrasi.

Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Baubau H. Yusran Fahim, SE usai menerima secara resmi dokumen rekomendasi dalam sidang paripurna DPRD Kota Baubau, Kamis (30/4/2026), yang mengagendakan laporan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ.

Dalam forum tersebut, DPRD menyampaikan sejumlah catatan strategis yang mencakup evaluasi kinerja sektor ekonomi, sosial, hingga pengelolaan keuangan daerah selama tahun anggaran 2025.

"Rekomendasi ini adalah wahana evaluasi menyeluruh. Semua yang disampaikan Pansus semata-mata untuk kepentingan pembangunan daerah," ujar Yusran Fahim dalam pidatonya.

Ia menegaskan, masukan dari legislatif akan dijadikan rujukan utama dalam merumuskan kebijakan ke depan, termasuk memperbaiki sektor-sektor yang dinilai masih belum optimal.

Di tengah evaluasi tersebut, Pemerintah Kota Baubau mencatat sejumlah capaian positif. Pertumbuhan ekonomi daerah pada 2025 mencapai 4,48 persen, dengan sektor perdagangan besar dan eceran sebagai pendorong utama yang tumbuh hingga 12,70 persen.

Selain itu, angka kemiskinan berhasil ditekan dari 7,40 persen pada tahun sebelumnya menjadi 6,83 persen pada akhir 2025, menunjukkan adanya perbaikan pada aspek kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, DPRD turut menyoroti adanya kontraksi pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mencapai minus 2,31 persen. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

"Catatan terhadap adap sektor yang mengalami kontraksi akan menjadi fokus evaluasi kami ke depan," kata Yusran.

Dari sisi fiskal, pendapatan daerah mengalami penye-

suain dari Rp945,7 miliar pada 2024 menjadi Rp873,27 miliar pada 2025. Penurunan ini dipengaruhi oleh dinamika ekonomi dan kebijakan fiskal yang berkembang.

Meski demikian, pemerintah daerah optimistis terhadap pengelolaan keuangan, mengingat capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang telah diraih selama 11 tahun berturut-turut.

"Kami optimistis tren positif ini dapat dipertahankan. Untuk 2025, kami masih menunggu hasil audit resmi dari BPK," ujarnya.

Secara historis, mekanisme penyampaian LKPJ kepala daerah kepada DPRD merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan pentingnya fungsi pengawasan legislatif terhadap kinerja eksekutif.

Di tingkat nasional, praktik ini sejalan dengan prinsip good governance yang mulai diperkuat sejak era reformasi 1998, di mana transparansi dan akuntabilitas menjadi pilar utama dalam penyelenggaraan pemer-

intahan.

Sementara itu, secara global, lembaga-lembaga seperti OECD dan Bank Dunia juga menekankan pentingnya evaluasi kinerja pemerintah berbasis laporan pertanggungjawaban sebagai instrumen penguatan kepercayaan publik.

Yusran Fahim menilai, sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah merupakan kunci dalam menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks.

"Kami mengajak seluruh elemen, baik legislatif maupun masyarakat, untuk terus menjaga kemitraan yang harmonis demi kemajuan Baubau," ujarnya.

Sidang paripurna tersebut sekaligus menegaskan bahwa proses evaluasi LKPJ bukan sekadar formalitas, melainkan bagian penting dari siklus perencanaan dan penganggaran yang berorientasi pada hasil.

Dengan berbagai catatan dan capaian yang ada, Pemerintah Kota Baubau diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat fondasi pembangunan daerah secara berkelanjutan. (*)

Sekda Baubau La Ode Darus Salam Buka Pra-OSN 2026, Dorong Lahirnya Generasi Kompetitif



Laporan: Prasetio M

BAUBAU, BP-Ratusan siswa tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Baubau mengikuti ajang Pra-Olimpiade Sains Nasional (OSN) tahun 2026 yang secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Baubau, La Ode Darus Salam, di Aula SMP Negeri 3 Baubau, Rabu (29/4/2026).

Kegiatan ini diikuti sedikitnya 414 siswa jenjang SD yang berlaga pada tiga mata pelajaran, yakni Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), serta peserta dari jenjang SMP dengan bidang yang sama.

Pelaksanaan lomba dijadwalkan berlangsung serentak pada Kamis (30/4/2026), dengan lokasi kegiatan dipusatkan di SD Negeri 2 Lamangga untuk tingkat SD, dan SMP Negeri 3 Baubau untuk tingkat SMP.

Pembukaan Pra-OSN ini menjadi bagian dari strategi Pemerintah Kota Baubau dalam memetakan kemampuan akademik siswa sekaligus menjangkau talenta unggul yang akan dipersiapkan menuju kompetisi tingkat nasional.

Sekretaris Daerah Kota Baubau, La Ode Darus Salam, dalam sambutannya menegaskan pentingnya ajang ini sebagai sarana pembinaan generasi muda di bidang sains. "Kegiatan ini mer-

upakan bentuk nyata dari upaya kita bersama dalam membangun generasi yang cerdas dan tangguh menghadapi tantangan masa depan," ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa prestasi di bidang sains harus menjadi komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan pendidikan di daerah. "Kami berharap melalui Pra-OSN ini lahir bibit-bibit unggul yang mampu mengharumkan nama Kota Baubau di tingkat nasional," katanya.

Dalam arahnya, Sekda mengingatkan peserta agar menjunjung tinggi nilai sportivitas dan kejujuran selama mengikuti kompetisi. "Menang atau kalah adalah hal biasa, tetapi integritas adalah yang utama," tegasnya.

Selain itu, ia juga memberikan pesan kepada dewan juri untuk menjalankan tugas secara objektif dan profesional. "Penilaian harus dilakukan secara jujur, tegas, dan adil demi menjaga kredibilitas kompetisi," tambahnya.

Panitia pelaksana pun diminta memastikan kesiapan teknis dan kelancaran kegiatan, sementara guru pendamping diharapkan terus memberikan motivasi kepada siswa tanpa terpengaruh hasil akhir yang dicapai.

Secara historis, Olimpiade Sains Nasional merupakan program berkelanjutan yang telah dikembangkan oleh pemerintah pusat sejak awal 2000-an sebagai bagian dari

peningkatan mutu pendidikan. Ajang ini menjadi pintu awal bagi siswa Indonesia untuk berkompetisi di tingkat internasional.

Di tingkat global, kompetisi sains seperti International Science Olympiad telah menjadi ajang prestisius yang mempertemukan pelajar terbaik dari berbagai negara, sekaligus menjadi tolok ukur kualitas pendidikan suatu bangsa.

Indonesia sendiri telah mencatat berbagai prestasi dalam ajang internasional tersebut, terutama pada bidang matematika dan sains, yang menunjukkan potensi besar generasi muda dalam penguasaan ilmu pengetahuan.

Melalui Pra-OSN tingkat daerah, pemerintah daerah berupaya memperkuat fondasi tersebut dengan melakukan seleksi dan pembinaan sejak dini secara sistematis dan berjenjang.

Pemerintah Kota Baubau menilai, penguatan pendidikan sains merupakan bagian penting dalam mendukung visi pembangunan daerah yang menekankan pada terciptanya masyarakat yang cerdas, sejahtera, dan berdaya saing.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan muncul generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter kuat dan integritas tinggi dalam menghadapi tantangan global. (*)